

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT II-III MEDAN - 20143

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan taufik-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun Anggaran 2026 dapat disusun. Melalui penyusunan rencana kerja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam perubahan kelembagaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2026 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2026. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 ini dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP Kota Medan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini, digunakan sebagai pedoman bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya sehingga terdapat arah kebijakan dalam penyusunan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun tahun berikutnya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Medan 24 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Medan.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSP	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	46
4.1 Prioritas Perangkat Daerah.....	46
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	49
BAB V PENUTUP.....	54

DAFTAR TABEL

TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Medan dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan sampai Tahun 2024.....	7
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.....	15
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan.....	22
Tabel T-C. 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 DPMPTSP Kota Medan.....	28
Tabel T-C. 32	Usulan Musrenbang.....	36
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Dalam Rangka Pencapaian Visi Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029.....	41
Tabel T-C. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027.....	42
Tabel 4.1	Alokasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2025.....	49
Tabel 4.2	Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan wujud implementasi dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Juga tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah tahun berjalan guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan,

lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Perumusan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui telaahan terhadap rancangan awal RKPD, usulan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas serta penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2026 ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025 – 2045;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;

18. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
20. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
22. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan;
23. Peraturan Walikota Medan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2026 dimaksudkan, adalah sebagai panduan/tolok ukur dalam melakukan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA DPMPTSP Kota Medan Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 serta proyeksi tahun 2027;
2. Mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Kota Medan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Medan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA MEDAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Medan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Prioritas Perangkat Daerah
- 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP
KOTA MEDAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dan Capaian Rencana Strategi (Renstra)

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun pertama dari Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029 yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Terkait dengan hal tersebut pada Renja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan mulai dari tahun 2024 sampai dengan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target pada Tahun 2026. Seiring berjalannya waktu program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi difokuskan kepada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impacts) kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan rencana.

Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Medan :

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Medan Dan Pencapaian Renstra
DPMPTSP Kota Medan s/d Tahun 2024

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

DPMPTSP KOTA MEDAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
			[4]		[5]		[6]		[7]		[8]=[5]+[7]		[9]=[8]/[4]x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				171,205,653,919		0		26,202,370,944		23,708,575,712		23,708,575,712		13.85
	Nilai Sakip Perangkat Daerah													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				171,205,653,919		0		26,202,370,944		23,708,575,712		23,708,575,712		13.85
	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100				100		90.78		90.78			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			116,832,237,457		0		21,625,342,584		19,689,975,975		19,689,975,975		16.85
	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100				100		91.05		91.05			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	140	116,188,284,407		0	140	21,491,402,584	130	19,563,591,975	130	19,563,591,975	91.03	16.84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	590,091,850		0	1	133,940,000	1	126,384,000	1	126,384,000	94.36	21.42

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
[1]		[2]	[3]	[4]		[5]		[6]		[7]		[8]=[5]+[7]		[9]=[8]/[4]x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,960,746,581		0		94,144,240		77,392,560		77,392,560		2.61
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	100				100		82.21		82.21			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	663,130,991		0	8	94,144,240	8	77,392,560	8	77,392,560	82.21	11.67
		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100				100		90.78		90.78			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,025,503,178		0		324,268,300		236,703,307		236,703,307		4.71
		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100				100		73.65		73.63			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	707,327,018		0	1	58,200,000	1	45,636,070	1	45,636,070	88.65	6.45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	1,163,099,000		0	8	147,950,000	3	89,140,237	3	89,140,237	57.66	7.66
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	1,723,034,512		0	1	43,920,000	1	29,000,000	1	29,000,000	66.03	1.68
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	1,432,042,648		0	1	74,198,300	1	72,927,000	1	72,927,000	98.29	5.09

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
[1]		[2]	[3]	[4]		[5]		[6]		[7]		[8]=[5]+[7]		[9]=[8]/[4]x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				14,563,507,981		0		251,000,000		245,445,000		245,445,000		1.69
		Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100				100		97.79		97.79			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	45	1,606,994,500		0	40	187,000,000	1	182,045,000	1	182,045,000	97.35	11.33
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6	2,517,481,675		0	1	64,000,000	1	63,400,000	1	63,400,000	99.06	2.52
		Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100				100		66.7		66.7			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				8,359,947,913		0		519,893,386		357,234,000		357,234,000		4.27
		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100				100		77.07		77.07			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	647,673,700		0	1	70,739,426	1	67,900,000	1	67,900,000	95.99	10.48
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	5,181,625,401		0	1	375,153,960	1	229,224,000	1	229,224,000	72.68	4.42
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	1,451,320,548		0	1	24,000,000	1	10,110,000	1	10,110,000	42.13	0.70
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	6	925,142,082		0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	100.00	5.40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22,145,892,809		0		3,387,722,434		3,101,824,870		3,101,824,870		14.01
		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100				100		92.53		92.53			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
[1]		[2]	[3]	[4]		[5]		[6]		[7]		[8]=[5]+[7]		[9]=[8]/[4]x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	5	5,080,165,528	0	0	1	998,418,020	1	971,530,620	1	971,530,620	97.31	19.12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6	11,026,889,795	0	0	1	1,223,100,574	1	1,001,587,330	1	1,001,587,330	81.89	9.08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	6	6,038,837,486	0	0	1	1,166,203,840	1	1,128,706,920	1	1,128,706,920	99.61	18.69
					7,184,898,130	0	0		813,433,000		563,233,000		563,233,000		7.84
		Indeks Kepuasan Masyarakat													
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					783,746,530	0	0		59,833,000		2,833,000		2,833,000		0.36
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,00			89			85.94		85.94		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				783,746,530	0	0		59,833,000		2,833,000		2,833,000		0.36
		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	-	89993				15000			11960		11960		
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	150	783,746,530	0	0	100	59,833,000	100	2,833,000	100	2,833,000	100.00	0.36
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					6,401,151,600	0	0		753,600,000		560,400,000		560,400,000		8.75
			Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1			1			1		1		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6,401,151,600	0	0		753,600,000		560,400,000		560,400,000		8.75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
			[4]		[5]		[6]		[7]		[8]=[5]+[7]		[9]=[8]/[4]x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Aplikasi	1				1		1		1			
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	6	6,401,151,600	0	1	753,600,000	1	560,400,000	1	560,400,000	1.00	8.75	
				17,086,254,144	0		1,224,433,700		497,529,500		497,529,500		2.91	
	Persentase Realisasi Investasi													
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				4,441,631,306	0	631,386,700		1,963,500		1,963,500		0.04		
	Jumlah regulasi terkait penanaman modal	regulasi	12			2		2		2				
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2,364,175,881	0	393,246,700		1,963,500		1,963,500		0.08		
	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	Dokumen	6			1		0		0				
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	5	2,364,175,881	0	1	393,246,700	0	1,963,500	0	1,963,500	0.00	0.08	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2,077,455,425	0		238,140,000	0	0		0		0.00	
	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	regulasi	12			2		2		2				
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	5	2,077,455,425	0	1	238,140,000	1	0	1	0	1.00	0.00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				3,577,587,442	0	301,047,000		261,066,000		261,066,000		7.30		

Dari Tabel T-C.29 diatas dapat dilihat hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Medan pada Tahun Anggaran 2024 bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 84,04 persen dengan predikat kinerja Tinggi. Tingginya capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Medan pada Tahun Anggaran 2024 berasal dari:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90,78 persen
 - b. Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar 85,94 persen
 - c. Progran Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar 74,06 persen.
 - d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar 73,11 persen
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 86,72 persen dan
 - f. Program promosi Penanaman Modal sebesar 80,31 persen
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	301.047.000.-
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	631.386.700.-
			100%	Program Promosi Penanaman Modal	292.000.000.-
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	59.833.000.-

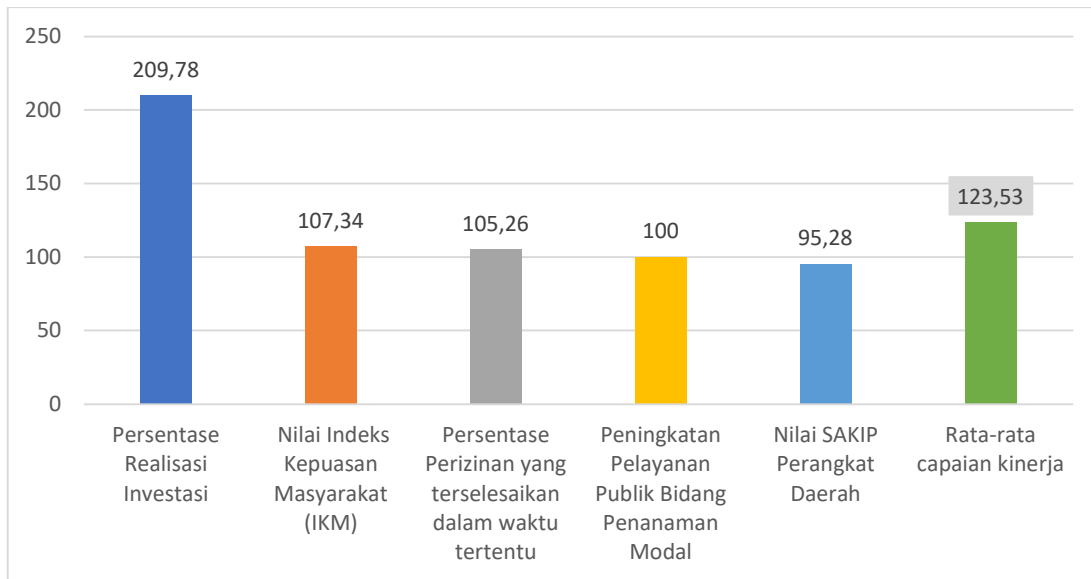
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	753.600.000.-
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal	59.833.000.-
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik Kota Medan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.202.370.944.-
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.202.370.944.-

3. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian		
							Persen	Predikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
1.	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	5.741.400.528.000 (80%)	9.635.332.350.000	209,78	Sangat Tercapai
		2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	92,54	107,34	Sangat Tercapai
				Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95 perizinan sesuai SOP	100%	105,26	Sangat Tercapai
				Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Persen	Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik (MPP)	100%	100	Sangat Tercapai
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (70)	B (66,70)	95,28	Tercapai		
Rata-rata capaian kinerja							123,53	Sangat Tercapai	



Gambar 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar **123,53%** yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Nilai realisasi investasi kota Medan saat ini mencapai Rp. 9.635.332.350.000 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 209,78% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Tercapai dengan capaian sebesar 95,28%.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{J_u}{J_u} \frac{B}{U} = \frac{1}{5} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{T \quad d \quad N \quad P \quad P \quad U}{T \quad u \quad y \quad t} \times \text{Nilai Penimbang}$$

IKM Unit Pelayanan X 25

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP

1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.621.938.840.000.- dari target Rp. 5.468.000.530.000.- atau tercapai sebesar 121,103% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- dari target Rp. 5.741.400.528.- atau sekitar 209,78% dari target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan capaian realisasi investasi dari tahun 2023 sehingga persentase realisasi investasi dikategorikan **Sangat Tercapai**

Analisis Keberhasilan Realisasi Investasi tahun 2024 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online agar nilai investasi akan terus meningkat.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 adalah 89 dari target nilai IKM 89 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2024 sebesar 92,54 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,54% dari target perizinan 95% yang masuk sesuai SOP dan termasuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan.

- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 memperoleh predikat “B” dengan nilai sebesar 66,70 dari target predikat “BB” dengan nilai (70), walaupun dari tahun sebelumnya masih tetap sama dalam perolehan predikat “B”, akan tetapi ada kenaikan dari jumlah nilai perolehan yaitu adanya kenaikan dari nilai 64,65 dari tahun 2023.

Analisis perolehan Nilai SAKIP pada DPMPSTSP :

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,00 dengan maksimal 30. Perolehan nilai tersebut dari evaluasi dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum memadai dikarenakan dalam anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 20,40 dari maksimal nilai 30. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja di tahun 2024.
- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark).
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 14,5 dari maksimal 25. Komponen ini belum memadai dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang.

Tabel T-C. 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Urusan Wajib

Bidang Urusan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal & PTSP KOTA MEDAN

NO.	Indikator	Satuan	Target IKK Tahun 2025	Target Renstra DPMPSTSP Kota Medan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	Persentase Realisasi Investasi	Rp.	7,635,000,000,000	5,741,400,528,000	7,635,000,000,000	7,787,000,000,000	7,943,000,000,000	9,635,332,350,000	5,281,495,990,000	7,787,000,000,000	7,943,000,000,000	Nilai Realiasi Investasi s/d Tw 1 th 2025 yg dikeluarkan oleh BKPM
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	89	89	89	89	92,54	92,19	89	89	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat s/d Tw 2 Th 2025
3	Persentase Perizinan Yang Terselesaikan Dalam Waktu Tertentu	%	95	95	95	95	95	105,26	100	95	95	-
4	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	B (66,70)	B	BB	BB	Nilai SAKIP PD s/d tw 2 belum ada penilaian

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatnya inovasi dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Medan. Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2024 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kota Medan adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah harus segera menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah.

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan

stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kota Medan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jempol dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmpptsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan.

3. SIPINTAS (Surat Izin Praktek Sehari Tuntas)

4. KELAS PERIZINAN BOSSKU (Belajar OSS Bagi Pelaku Usaha)

5. Q & A Lingkup Sektor Perizinan (IG Live DPMPPTSP Kota Medan)

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.

- Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan penanaman modal adalah dengan melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stake holder terkait.
2. Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
3. Dilakukan perekrutan tenaga ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana.
5. Kolaborasi dan koordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Formulasi isu-isu penting bidang penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Peraturan Perundangan yang cepat di tingkat Pusat mengenai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal terkait Kewenangan Daerah tentang Perizinan.
2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata - rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan perizinan
3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah menyediakan website dengan situs www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.

6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
7. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat serta waktu pengurusan izin Penanaman Modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.
8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal.
9. Belum efektifnya kegiatan Promosi Penanaman Modal untuk mendorong peningkatan kerjasama Investasi dan realisasi Investasi Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) 2026 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rancangan Awal Tahun 2026 digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan Usulan Musrenbang Tahun 2026. Setelah Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka setiap OPD menyesuaikan Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban mendukung kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah khususnya misi "UNGGUL ". Misi UNGGUL adalah Terwujudnya SDM dan Perekonomian Kota Medan yang Berdaya Saing dan Unggul, dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal OPD, termasuk dalam hal penganggaran. Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan

Urusan: Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan: Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	BIDANG PENANAMAN MODAL					Rp 35.618.766.972	BIDANG PENANAMAN MODAL					Rp 35.618.766.972
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	Rp 33.390.363.772	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	Rp 33.390.363.772	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp 489.464.606	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp 489.464.606	-	
07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	6 Laporan	Rp 489.464.606	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	6 Laporan	Rp 489.464.606		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		Rp 23.526.385.055	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		Rp 23.526.385.055	-	
01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	Rp 23.342.994.430	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	Rp 23.342.994.430	-	

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp 88.440.000	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp 88.440.000	
05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp 94.950.625	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	Rp 94.950.625	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase pemenuhan administrasi umum		Rp 1.051.170.789	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase pemenuhan administrasi umum		Rp 1.051.170.789	-
01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp 60.398.550	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp 60.398.550	-
04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Rp 788.924.595	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Rp 788.924.595	-
05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan -	12 Bulan	Rp 147.643.644	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan -	12 Bulan	Rp 147.643.644	-
09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	Rp 54.204.000	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	Rp 54.204.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp 941.925.980	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp 941.925.980	-

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	Rp 68.934.315	<i>Pengadaan Mebel</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	Rp 68.934.315	-
10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	Rp 733.220.195	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	Rp 733.220.195	-
011	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Berjalan Dengan Baik	1 Tahun	Rp 139.771.470	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Berjalan Dengan Baik	1 Tahun	Rp 139.771.470	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 5.842.493.595	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 5.842.493.595	-
01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyurat	1 paket	Rp 34.991.000	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Tenaga Non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyurat	1 paket	Rp 34.991.000	-
02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum	12 Bln	Rp 2.710.008.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum	12 Bln	Rp 2.710.008.000	-
04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	5 laporan	Rp 3.097.494.595	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	5 laporan	Rp 3.097.494.595	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah		Rp 1.538.923.747	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah		Rp 1.538.923.747	-

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Thn	Rp 73.630.947	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Thn	Rp 73.630.947	-
02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Thn	Rp 502.792.800	<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Thn	Rp 502.792.800	-
06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	12 Bulan	Rp 657.250.000	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	12 Bulan	Rp 657.250.000	
011	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Thn	Rp 305.250.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Thn	Rp 305.250.000	
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Peningkatan Investasi	100%	Rp 690.083.080	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Peningkatan Investasi	100%	Rp 690.083.080	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal		Rp 90.083.080	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal		Rp 90.083.080	

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
01	<i>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp 43.428.750	<i>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp 43.428.750	
03	<i>Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 46.654.330	<i>Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 46.654.330	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim usaha dan iklim investasi		Rp 600.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim usaha dan iklim investasi		Rp 600.000.000	
04	<i>Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/Kota</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	1 Dokumen	Rp 600.000.000	<i>Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/Kota</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	1 Dokumen	Rp 600.000.000	
III	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	100%	Rp 588.254.009	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	100%	Rp 588.254.009	-
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Promosi Penanaman Modal		Rp 588.254.009	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Promosi Penanaman Modal		Rp 588.254.009	
	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Target Investasi di Kota Medan</i>	10 promosi	Rp 588.254.009	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Target Investasi di Kota Medan</i>	10 promosi	Rp 588.254.009	-

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah dokumen kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	3 dokumen	Rp 588.254.009	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Medan	3 dokumen	Rp 588.254.009	
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	100%	Rp 24.300.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	100%	Rp 24.300.000	-
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan		Rp 24.300.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan		Rp 24.300.000	-
05	<i>Koodinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah</i>	2 dokumen	Rp 24.300.000	<i>Koodinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah</i>	2 dokumen	Rp 24.300.000	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Realisasi Penanaman Modal	100%	Rp 244.418.565	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Persentase Realisasi Penanaman Modal	100%	Rp 244.418.565	-

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM online/PMDN)		Rp 244.418.565	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM online/PMDN)		Rp 244.418.565	-
04	<i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	10 Kegiatan	Rp 41.942.070	<i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	10 Kegiatan	Rp 41.942.070	-
05	<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang mengikutii Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	200 Perusahaan	Rp 137.387.120	<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang mengikutii Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	200 Perusahaan	Rp 137.387.120	
06	<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	200 Kegiatan usaha	Rp 65.089.375	<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	200 Kegiatan Usaha	Rp 65.089.375	

NO.	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	100%	Rp 681.347.546	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	100%	Rp 681.347.546	-
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan		Rp 681.347.546	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi pada tingkat daerah Kota Medan		Rp 681.347.546	-
02	<i>Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	Rp 681.347.546	<i>Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik</i>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Medan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik yang diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	Rp 681.347.546	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2026 ini kami peroleh dari masukan rapat-rapat reses DPRD Kota Medan, masukan langsung dari masyarakat dan Pelaku Usaha ketika melaksanakan sosialisasi dan diseminasi pelayanan perizinan, monitoring penanaman modal, bimtek LKPM Online, serta dari pengaduan langsung maupun online.

Dari masukan-masukan di atas kami mencoba merumuskan dan melakukan evaluasi, dimana secara umum masukannya adalah agar DPMPSTP memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam mendapatkan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, dan sederajat. Begitu juga tuntutan Pelaku Usaha agar waktu penerbitan izin sesuai SOP, serta persyaratan harus jelas dan tidak berubah-ubah atau konsisten.

Usulan Program dan Kegiatan dari usulan Musrenbang pada Forum OPD untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut, tertuang pada Tabel T-C. 32

Tabel T-C. 32 Usulan Musrenbang

No	Tujuan strategis	Sasaran strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pengusul	Usulan (Kegiatan Prioritas)	Permasalahan	Alamat/Detail Lokasi	Volume Anggaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Pertumbuhan Investasi di Kota Medan	Meningkatnya Nilai Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Kecamatan Medan Selayang	Sosialisai Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penenaman Modal	Kurangnya Pemahaman Masyarakat untuk mengurus izin usaha	Kecamatan Medan Selayang	Rp.9.000.000 (30 orang)
2.				Kecamatan Medan Baru	Sosialisai Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penenaman Modal	Perlunya dilakukan Sosialisasi perizinan dan non perizinan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui cara mengurus perizinan dan melengkapi izin usahanya	Kec. Medan Baru	Rp. 9.000.000 (30 orang)
3.				Kecamatan Medan Baru	Sosialisai Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penenaman Modal	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Perizinan Usaha	Pelaku usaha dan masyarakat	Rp. 15.000.000 (50 orang)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA MEDAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Investasi, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM, memiliki implikasi penting bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah. BKPM berperan dalam mengarahkan dan memfasilitasi investasi, sementara DPMPTSP menjadi ujung tombak dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi di tingkat daerah. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu meningkatkan *ease of doing business* (kemudahan berusaha) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah serta amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perumusan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini

No.	Substansi Kegiatan	Diakomodir dalam Renja DPMPTSP Tahun 2026
[1]	[2]	[3]
	<i>Urusan Wajib Penanaman Modal</i>	
1.	Penyelenggaraan Aplikasi Perizinan Terpadu Melayani Secara Terdepan (SIPANDU)	√
2.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>)	√
3.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan OSS, menyediakan; a. Pelayanan Mandiri; b. Pelayanan Berbantuan; dan Pelayanan Strategis.	√

No.	Substansi Kegiatan	Diakomodir dalam Renja DPMPTSP Tahun 2026
[1]	[2]	[3]
4.	<i>Standar Operating Prosedure</i> (SOP) Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	√
5.	<i>Standar Operating Prosedure</i> (SOP) Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha	√

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Medan

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Medan memerlukan arah kebijakan yang terarah, sistematis, dan berbasis data guna mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing, serta sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi daerah, dinamika sosial, serta prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai landasan strategis dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Medan menetapkan visi berikut: **Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan periode 2025-2029, yaitu:

1. Misi Berbudaya

Misi Berbudaya Kota Medan bertujuan untuk menjadikan membangun kota yang berkarakter berbasis budaya multikultural.

2. Misi Energik

Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

3. Misi Ramah

Misi Ramah Kota Medan berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik berbasis data, riset, dan inovasi.

4. Misi Tertib

Misi Tertib Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, dan mendorong budaya taat aturan di tenaghatengah masyarakat.

5. Misi Unggul

Misi Unggul Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia dan daya saing perekonomian yang unggul.

6. Misi Aman

Misi Aman Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan medan kota yang aman dan nyaman, demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

7. Misi Humanis

Misi Humanis Kota Medan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Sesuai Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah salah satu Perangkat Daerah yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung Misi RAMAH dan Misi UNGGUL, untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan tujuan dari misi RAMAH dan UNGGUL RPJMD Kota Medan 2025-2029 dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada di dalamnya yaitu “ Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif dan Terwujudnya SDM dan Perekonomian Kota Medan yang Berdaya Saing dan Unggul”. Sementara sasaran pembangunan Kota Medan 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kota Medan adalah sasaran ke-tiga, yaitu “Meningkatnya iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Medan Tahun 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan DPMPTSP Kota Medan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Iklim Invesasi yang Kompetitif”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas maka ditetapkan tiga sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya nilai realisasi investasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai Investasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Untuk memperoleh gambaran hubungan antara keduanya,tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dapat dilihat di Tabel 3.2. dibawah ini

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Medan
 Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	89	89	89	89	89	89	
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai SAKIP Perangkap Daerah	BB (75,6)	BB (76)	BB (76,4)	BB (76,8)	BB (77,2)	BB (77,6)	BB (78)	

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2026 merupakan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2025-2029 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2026, berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2025-2029.

Untuk lebih memfokuskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2025-2029 terdiri dari 6 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, dan evaluasi kinerja, kegiatan administrasi keuangan, kegiatan administrasi umum, kegiatan pengadaan barang, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah.
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, berfokus pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dan kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi. Pada program ini diarahkan untuk penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan penanaman modal, dan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal. Serta dilakukan Penyusunan Rencana umum Penanaman Modal Daerah.
 - Program Promosi Penanaman Modal berfokus pada kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal dan kegiatan pelaksanaan promosi penanaman modal daerah, pada program ini diarahkan untuk dilakukan Penyusunan Strategi Promosi penanaman modal dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah guna tercapainya Target Investasi di Kota Medan melalui kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diikuti oleh Pelaku Usaha dan UMKM Kota Medan.
 - Program Pelayanan Penanaman Modal berfokus pada kegiatan Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui didtemperizinan berusaha berbasis resiko yang terintegritas secara elektronik dan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan non perizinan penanaman modal bagi pelaku usaha.
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berfokus pada

kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan melakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan melakukan pengawasan penanaman modal.

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal berfokus pada kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota serta kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Medan, tepatnya pada misi yaitu "*MEDAN UNGGUL*" dengan tujuan Terwujudnya SDM dan Perekonomian Kota Medan yang Berdaya Saing dan Unggul dengan sasaran Meningkatkan iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan perlu melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 yang disajikan pada tabel T-C. 33 berikut :

T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

**Urusan Wajib
Bidang Urusan Penanaman Modal
DPMPSTSP KOTA MEDAN**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						REKAPITULASI			
Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2026						RKA-BELANJA			
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						SKPD			
Rincian Anggaran Belanja									
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026									
Kode	Uraian	Tahun N			Tahun + 1				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)					
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 35,328,769,206	Rp 289,997,766	Rp 35,618,766,972	Rp 36,673,409,198
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp 35,328,769,206	Rp 289,997,766	Rp 35,618,766,972	Rp 36,673,409,198
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 690,083,080		Rp 690,083,080	Rp 725,587,800
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 90,083,080		Rp 90,083,080	Rp 95,587,800
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp 43,428,750		Rp 43,428,750	Rp 45,612,000
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 46,654,330		Rp 46,654,330	Rp 49,975,800
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 600,000,000		Rp 600,000,000	Rp 630,000,000
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 600,000,000		Rp 600,000,000	Rp 630,000,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 588,254,009		Rp 588,254,009	Rp 650,000,000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 588,254,009		Rp 588,254,009	Rp 650,000,000
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 588,254,009		Rp 588,254,009	Rp 650,000,000

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026**

Kode					Uraian	Tahun N			Tahun + 1
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 24,300,000		Rp 24,300,000	Rp 25,515,000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 24,300,000		Rp 24,300,000	Rp 25,515,000
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp 24,300,000		Rp 24,300,000	Rp 25,515,000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 244,418,565		Rp 244,418,565	Rp 257,850,600
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 244,418,565		Rp 244,418,565	Rp 257,850,600
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp 41,942,070		Rp 41,942,070	Rp 44,100,000
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp 137,387,120		Rp 137,387,120	Rp 144,555,600
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Rp 65,089,375		Rp 65,089,375	Rp 69,195,000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 654,758,341	Rp 26,589,205	Rp 681,347,546	Rp 715,567,440
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 654,758,341	Rp 26,589,205	Rp 681,347,546	Rp 715,567,440
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 654,758,341	Rp 26,589,205	Rp 681,347,546	Rp 715,567,440

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026**

Kode					Uraian	Tahun N			Tahun + 1
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 33,126,955,211	Rp 263,408,561	Rp 33,390,363,772	Rp 34,298,888,358
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 489,464,606		Rp 489,464,606	Rp 522,837,000
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 489,464,606		Rp 489,464,606	Rp 522,837,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 23,526,385,055		Rp 23,526,385,055	Rp 24,547,048,055
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 23,342,994,430		Rp 23,342,994,430	Rp 24,339,694,055
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 88,440,000		Rp 88,440,000	Rp 109,494,000
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 94,950,625		Rp 94,950,625	Rp 97,860,000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,051,170,789		Rp 1,051,170,789	Rp 1,097,534,720
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 60,398,550		Rp 60,398,550	Rp 84,000,000
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 788,924,595		Rp 788,924,595	Rp 800,000,000
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 147,643,644		Rp 147,643,644	Rp 161,034,720
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 54,204,000		Rp 54,204,000	Rp 52,500,000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 678,517,419	Rp 263,408,561	Rp 941,925,980	Rp 1,449,125,000
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Rp 68,934,315	Rp 68,934,315	Rp 157,500,000
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 678,517,419	Rp 54,702,776	Rp 733,220,195	Rp 1,100,000,000
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp 139,771,470	Rp 139,771,470	Rp 191,625,000

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026**

Kode					Uraian	Tahun N			Tahun + 1
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5,842,493,595		Rp 5,842,493,595	Rp 5,805,399,595
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 34,991,000		Rp 34,991,000	Rp 36,750,000
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2,710,008,000		Rp 2,710,008,000	Rp 3,024,000,000
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3,097,494,595		Rp 3,097,494,595	Rp 2,744,649,595
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,538,923,747		Rp 1,538,923,747	Rp 876,943,988
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 73,630,947		Rp 73,630,947	Rp 89,985,000
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 502,792,800		Rp 502,792,800	Rp 367,794,000
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 657,250,000		Rp 657,250,000	Rp 281,352,488
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 305,250,000		Rp 305,250,000	Rp 137,812,500

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA MEDAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Medan tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud DPMPTSP berperan dalam melakukan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan pada kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)		Sumber Dana
		Usulan	Perubahan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.608.841.990	35.591.466.972	APBD
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	35.426.931.190	33.706.914.672	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	661.363.300	527.040.000	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)		Sumber Dana
		Usulan	Perubahan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	106.513.300	0	APBD
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	554.850.000	527.040.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	23.409.181.004	23.407.241.004	APBD
2.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23.180.661.004	23.180.661.004	APBD
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000	104.280.000	
2.2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	124.240.000	122.300.000	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	172.000.000	0	APBD
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	172.000.000	0	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.281.616.668	1.050.002.750	APBD
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	175.000.000	291.000.000	APBD
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	766.104.568	637.333.849	APBD
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	240.512.100	143.668.901	APBD
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.0000	50.000.0000	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.980.107.134	2.391.301.828	APBD
5.1	Pengadaan Mebel	200.000.000	150.000.000	APBD
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.495.107.134	2.023.801.828	APBD
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.000.000	217.500.000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.825.603.090	5.119.398.090	APBD
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	35.000.000	APBD
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000.000	2.520.000.000	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)		Sumber Dana
		Usulan	Perubahan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.490.603.090	2.564.398.090	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.097.059.994	1.121.931.000	APBD
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.700.000	85.700.000	APBD
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409.500.000	396.036.000	APBD
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.860.000	505.195.000	APBD
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.999.994	225.000.000	APBD
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	920.040.000	690.663.500	APBD
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	238.140.000	93.300.000	APBD
1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	238.140.000	93.300.000	APBD
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	681.900.000	597.363.500	APBD
2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	681.900.000	597.363.500	APBD
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	186.410.000	186.410.000	APBD
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	186.410.000	186.410.000	APBD
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	186.410,000	186.410.000	APBD
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	29.33.000	29.333.000	APBD

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)		Sumber Dana
		Usulan	Perubahan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.33.000	29.333.000	APBD
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinn Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	29.33.000	29.333.000	APBD
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	335.727.800	367.745.800	APBD
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	335.727.800	367.745.800	APBD
1.1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	197.767.800	229.785.800	APBD
1.2	Pengawasan Penanaman Modal	137.960.000	137.960.000	APBD
IV.	PROGRAM PENGELOLA DATA dan SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	710.400.000	610.400.000	APBD
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	710.400.000	610.400.000	APBD
1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	710.400.000	610.400.000	APBD

4.2. Prioritas Perangkat Daerah dan Pendanaan

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana
[1]					[2]	[3]
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 690.083.080,00
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 90.083.080,00
2	18	02	2,01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 43.428.750,00
2	18	02	2,01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 46.654.330,00
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 600.000.000,00
2	18	02	2,02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 600.000.000,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 588.254.009,00
2	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 588.254.009,00
2	18	03	2,01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 588.254.009,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 24.300.000,00
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 24.300.000,00
2	18	04	2,01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp. 24.300.000,00
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 244.418.565,00
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 244.418.565,00
2	18	05	2,01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. 41.942.070,00
2	18	05	2,01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp. 137.387.120,00
2	18	05	2,01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 65.089.375,00

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana
[1]					[2]	[3]
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 681.347.546,00
2	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 681.347.546,00
2	18	06	2,01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 681.347.546,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah serta berfungsi untuk menilik kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan selama Tahun Anggaran 2026, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terutama dalam peningkatan Perekonomian Daerah mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM, Jumlah modal dan investasi termasuk serta peningkatan pariwisata sebagai berikut :

- Akan melakukan penyederhaan Birokrasi dan Regulasi berfokus pada penyederhaan dan percepatan proses perizinan untuk mempermudah investor dalam menanamkan modal yang dilakukan melalui sistem online single submission (OSS) agar investor dapat memperoleh izin lebih cepat dan transparan.
- Pemberian Insentif Investasi dengan Terbitnya Perda Nomor 4 tahun 2024 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yaitu :

Insentif Fiskal, Insentif non fiskal, penyediaan data dan informasi yang transparan melalui aplikasi SI MEDAN PANTAS (Investasi Medan Peluang Tanpa Batas)

- Penyediaan data ekonomi dan informasi investasi yang komprehensif (PMA dan PMDN) melalui pusat data investasi.
- Penyediaan panduan investasi dan pendampingan untuk calon investor mulai dari tahap perencanaan hingga operasional akan ditingkatkan melalui lembaga-lembaga pendukung investasi.

Rencana Kerja yang telah disusun ini menjadi pedoman dan akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi diharapkan dapat timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renja ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diharapkan dapat melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2026 dalam pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat juga diharapkan lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum terutama pelaku usaha serta bagi pengguna layanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini beberapa hal mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan saran guna penyempurnaan penyusunan buku ini dan dapat bermanfaat serta dapat dipergunakan dimasa akan datang.

Medan 24 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001